**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan tentang kesejahteraan sosial**

**1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta ”catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga dalam hidupnya aman dan tentram, baik lahir dan batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “*socius*” yang berarti kawan, teman dan kerja sama. Orang sosial adalah orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka kesejahteraan sosial dapat diartikan sabagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik Fahrudin (2014: 8-9). Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep yang terus berkembang. Berdasarkan Friedlander dalam Suud (2006: 8) menyatakan kesejahteraan sosial adalah:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi diatas menjelaskan bahwa:

1. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau *organized syistem* yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial.
2. Tujuan sistem tersebut ialah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan kesehatan dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya.
3. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara, meningkatkan kemampuan individu atau kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Sistem ketatanegaraan Indonesia juga sangat mengenal istilah kesejahteraan sosial. MenurutUndang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 yaitu “Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Berdasarkan Undang–Undang tersebut dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosialnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, sedangkan kebutuhan sosial seperti keamanan dan ketentaraman hidup.

**2. Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2014: 10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

1. Pemeliharaan sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyrakat, termasuk hal-hal yang yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa dari orang tua dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyakat dan lain-lain.

1. Pengawasan sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari niali-nilai sosial. Hal ini dimaksudkan agar dapat di tingkatkan pengawasan diri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya. Disamping itu, dapat pula di pergunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku.

1. Perubahan sistem

Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap pertisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Kemudian menurut UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahetraan sosial pasal 3 dalam menyatakan tujuan kesejahetraan sosial yaitu:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsuangan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahetraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahetraan sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahetraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejaheraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas menejemen penyelenggaraan kesejahetraan sosial.

**3. Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang di akibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Fahrudin (2014: 12) fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola yang baru.

1. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung atau pun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencangkup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

**B. Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial**

**1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial baik kita suka atau tidak hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat). Dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *human relation*. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut Friendlander dalam Iskandar (2013: 26) menyatakan pekerjaan sosial yaitu:

Pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang di dasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok untuk mencapai kepuasan dan ketidaktergantuangan secara pribadi dan sosial.

Pengertian yang dinyatakan oleh Friendlander menekankan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat dengan di dasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, serta bertujuan untuk mencapai kepuasan pribadi, kepuasan sosial, dan kebebasan. Jadi yang menjadi inti pengertian pekerjaan sosial menurut Friedlander adalah relasi atau interaksi antar manusia.

Pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial yang baik, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi antar individu, kelompok dan masyarakat, serta memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik.

Upaya tersebut di dasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*) dan kerangka nilai (*body of value*) yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial. Ketiga komponen tersebut di bentuk dan di kembangkan secara eklektik dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikolog, antropologi, filsafat, politik, dan ekonomi.

Menurut Siporin dalam Fahrudin, (2014: 61) menyatakan bahwa pekerjaan sosial yaitu “*social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and to resolve their social problem, to retore and enhance their social functioan*”. “Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka”.

Definisi di atas yang dimaksud dengan pekerjaan sosial adalah suatu profesi sosial yang berbadan hukum yang memiliki tujuan membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam proses pemecahan masalah-masalah sosial dan mencarikan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang berfungsi sebagai penguatan agar masalah yang telah teratasi tidak muncul lagi dan berkembang dengan menimbulkan masalah sosial lain.

Pekerja sosial dalam menjalankan pekerjaannya yang bertujuan membantu individu, kelompok dan masyarakat juga membantu mencarikan alternatif pemecahan masalah. Pekerja sosial juga harus menggali potensi-potensi, memperbaiki keberfungsian sosial, meminimalisir hambatan-hambatan dengan cara mendekatkan dengan sistem sumber yang dapat di manfatkan untuk memecahkan masalah yang di hadapi.

**2. Tujuan Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangakan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang di alami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan dalam Sukoco (2011: 19) adalah sebagai berikut:

1. *Enhance the problem solving and coping capacities of people.*
2. *Link problem with systems that provide them with resources, service, and opportunities.*
3. *Promote the effective and human operation of these systems.*
4. *Contribute to the development and improvement of social policy.*

Sedangkan menurut pendapat lain yang sebagaimana dinyatakan oleh Zastrow dalam Suharto (2009: 87) tujuan pekerjaan sosial adalah:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang di alaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja sistem sehingga mampu memberikan pelayanan yang efektif, berkualitas, dan berprikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondufis bagi tercapainya kemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

**3. Fungsi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial di dalam usaha mencapai tujuannya, yaitu memecahkan permasalahan sosial dan meningkatkan kemampuan orang dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan sistem sumber perlu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Menurut Iskandar (2013: 30) adapun fungsi pekerjaan sosial di dalam sistem kesejahetraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahetraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin standar subsistensi kesehatan dan kesejahetraan yang memadai warga.
3. Membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institusi-institusi sosial maupun status-statusnya.
4. Menompang dan memperbaiki tertip sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.

Sedangkan menurut Leonara serafica-de Guzman dalam (Sukoco, 2011: 51) menyatakan adanya tiga fungsi pekerjaan sosial yaitu:

1. Fungsi Restoratif

Pekerjaan sosial melakukan fungsi restoratif terhadap bagian-bagian yang tidak atau kurang berfungsi. Fungsi restoratif ini mencangkup kegiatan penyembuhan (*treatment*) dan rehabilitasi. Kegiatan penyembuhan (*treatment*) mencangkup kegiatan identifikasi, pengontrolan dan penghapusan faktor-faktor yang ada di dalam proses interaksional. Sedangkan rehabilitasi mencangkup upaya untuk merekontruksi dan mengorganisasi pola-pola interaksi yang telah rusak dan pecah atau membangun kembali pola interaksi terbaru.

1. Fungsi Pencegahan/*Preventive*

Fungsi pencegahan dalam konteks pekerjaan sosial berupa kegiatan untuk menemukan secara awal, mengontrol dan menghapus kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak mampu berfungsi sosial.

1. Fungsi Pengembangan

Fungsi pengembangan dalam pekerjaan sosial di fokuskan kepada pengembangan keberfungsian sosial/klien secara optimal dan pengasuhan (*nature and optimum*), sehingga dapat terealisasi potensi-potensinnya dan meningkatkan pola kemampuannya.

**4. Peran-peran Pekerja Sosial**

1. Pemungkin/Fasilitator (*Enebler*)

Peranan sebagai *enebler* adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif Zastrow dalam Huraerah (2008: 149).

1. Penghubung (*Broker*)

Peranan seorang *broker* adalah menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat Zastrow dalam Huraerah (2008: 150).

1. Tenaga Ahli (*Expert*)

Sebagai seorang *expert*, ia berperan menyediakan informasi dan memberi saran-saran dalam berbagai area Zastrow dalam Huraerah (2008: 150).

1. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Seorang *social planner* berperan mengumpulkan fakta-fakta masalah sosial dan menganalisa fakta-fakta tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut Zastrow dalam Huraerah (2008: 150).

1. Pembela (*Advocate*)

Peran pembela atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembela dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang di bela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat Suharto (2014: 102).

1. Aktivis (*Activist*)

Sebagai seorang *activist*, ia senantiasa melakukan perubahan yang mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantaged group*) Zastrow dalam Huraerah (2008: 151).

**5. Proses Intervensi dalam Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial dalam menangani permasalahan klien akan mengadakan serangkaian kegiatan intervensi atau proses pertolongan yang pada hakekatnya merupakan semua tindakan pekerja sosial yang diarahkan kepada beberapa bagian sistem sosial dengan tujuan mengadakan perubahan dalam sistem tersebut. Menurut Iskandar (2013: 65-68) tahapan-tahapan intervensi (proses pertolongan) pekerjaan sosial dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Engagement, IntakedanKontrak

Tahap ini adalah permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang di butuhkan klien, pelayanan apa yang dapat di berikan pekerja sosial oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Dengan kodisi semcam itu maka pekerja sosial dapat menciptakan relasi pertolongan profesional yaitu sebagai suatu pola ekpektasi, interaksi dan interdipensi yang bersifat resiprokal antara pekerja sosial dan klien, dimana pekerja sosial menyediakan dan menggunakan sumber-sumber tertentu untuk membantu klien dan klien dapat menggunakan sumber-sumber tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Pada akhirnya dapatlah di buat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya di rumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak di capai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan di gunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

1. Tahap Assessment

Assessment proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah terdahulu yang pernah di lakukan klien (hasil dan kegagalannya), kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah di tetapkan fokus akar masalah klien. Dalam rangka assesment ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumplan data lainnya yang dianggap tepat.

1. Tahap Membuat Perencanaan Intervesi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang di susun dan di rumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan di lakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasaran serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi di susun dan di rumuskan berdasarkan hasil assesment yang telah di lakukan sebelumnya oleh pekerja sosial. Pada garis besarnya rencana intervensi membuat hal-hal berikut:

1. Fokus/akar masalah klien.
2. Tujuan pemecahan masalah klien berikut indikator-indikator keberhasilanya.
3. Sistem dasar praktek, yang meliputi:
4. Sistem klien.
5. Sistem sasaran.
6. Sistem pelaksanaan perubahan.
7. Sistem kegiatan.
8. Pokok-pokok program kegiatan pemecahan masalah, yang meliputi tahapan-tahapan:
9. Tugas-tugas motivasi yaitu menghilangkan faktor-faktor penyebab masalah klien, memperbaiki motif-motif klien yang rusak dan mengarahkan perilaku klien pada tujuan perubahan.
10. Tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya memberikan dan meningkatkan kemampuan-kemampuan klien yang meliputi dimensi: pengetahuan, keterampilan berkomunikasi dan berelasi dan berinteraksi, pengalaman-pengalam dan keahliaan kegunaan kerja.
11. Tugas-tugas yang berkaitan dengan menciptakan kesempatan, yaitu merubah lingkungan sosial klien sehingga dapat mendorong dan menerima penampilan peranan-peranan sosial klien.
12. Tugas-tugas memobilisasi sumber-sumber yang dapat di jangkau dan di gunakan oleh klien untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta memecahkan masalahanya.
13. Tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya untuk memelihara dan menetapkan peruhan-perubahan yang telah di capai oleh klien.
14. Metode-metode pertolongan yang di gunakan untuk memberikan pertolongan kepada klien, yang mencangkup antara lain:
15. Model-model pendekatan yang digunakan.
16. Medel dan teknik pertolongan.
17. Strategi dan taktik pertolongan.
18. Tahap pelaksanaan intervensi (Pemecahan Masalah Klien).
19. Tahap Melaksanakan Program

Berdasarkan rencana intervensi di atas maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaannnya melibatkan klien secara aktif pada setiap tahapan.

1. Tahap Evaluasi

Tahap ini pekerja sosial harus mengevalusi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah di lakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalan atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus di evaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

1. Tahap Terminasi (Pengakhiran/Pemutusan Kegiatan Pertolongan)

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referal atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang di hadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

**C. Tinjauan tentang Pelayanan Sosial**

**1. Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial berkaitan dengan konsep Negara kesejahteraan sosial (*welfare state*). Negara kesejahetraan merupakan sistem yang memberikan kepada Negara untuk pro aktif dan responsif dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Selain itu, sebuah aktivitas yang terorganisir, pelayanan sosial tidak dapat di pisahkan dengan pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusian yang memiliki tugas utama memberikan atau mendistribusikan pelayanan sosial. Menurut Romanyshyn dalam Fahrudin (2014: 51) menyatakan pelayanan sosial sebagai berikut:

Pelayanan sosial adalah sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga-keluarga melalui sumber-sumber sosial pendukung dan proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stres dan tuntunan-tuntunan kehidupan sosial yang normal.

Pengertian yang dikemukakan oleh Romanyshyn ini melihat bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial seseorang agar kembali seperti biasanya dan memperbaiki kualitas kehidupan dengan sumber pendukung yang memadai. Pengertian yang dinyatakan oleh Romanyshyn merupakan dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas menurut Khan dalam Fahrudin (2014: 51-52) adalah:

*Social service may be interpreted in an institutional context as consisting of programs made available by other than market criteria to assure a basic level of health-educatioan-welfare provision, to enhance communal living and individual functioning, to facilitate, access to services and institutions generally, and to assist those in difficulty and need.*

(pelayanan sosial dapat di tafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang di sediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-peendidikan- kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga- lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan).

Kriteria pemberian pelayanan sosial bukan berdasarkan kriteria pasar, artinya tidak berdasarkan kemampuan untuk membayar. Pemberian pelayanan sosial berdasarkan kebutuhan walaupun orang miskin tetap akan mendapatkan pelayanan yang di butuhkannya. Maksudnya pelayanan dasar seperti (kesehatan, pendidikan, perumahan jaminan sosial, pelatihan ketermapilan kerja) semuanya disediakan pada tingkat minimal untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pada umumnya baik kualitas maupun kuantitas dari pelayanan sosial akan berbeda-beda sesuai tingkat perkembangan dan kemakmuran suatu Negara dan juga sesuai dengan faktor sosial-kultural dan politik yang juga menentukan prioritas pelayanan. Semakin tersebarnya dan di praktekan secara universal pelayanan sosial, maka pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang di tunjukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus.

**2. Fungsi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial telah mungkin akan diklasifikasikan dalam berbagai cara, tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Muhidin (1997: 41) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut:

1. Peningkatan kondisi kehidupan sosial.
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian.
4. Memobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Sedangkan menurut Titmuss dalam Muhidin (1997: 42) mengemukakan fungsi pelayanan sosial di tinjau dari perspektif masyarakat sebagai berikut:

1. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat.
3. Pelayanan-pelayanan dan keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial.

**D. Tinjauan tentang Masalah Sosial**

Para sosiolog biasa memandang masalah sosial sebagai situasi tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang, mereka setuju bahwa tindakan harus dilakukan untuk mengubah situasi itu. Para pekerja sosial sering kali mendefinisikan masalah sosial sebagai “terganggunya keberfungsian individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengarui kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, meralisasikan nilai-nilai yang dianutnya serta menjalankan peranan-peranannya dimasyarakat” Suharto (2009: 151).

Menurut Jenssen dalam Suharto (2009: 152) secara luas masalah sosial di definisikan sebagai “perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya”. Sedangkan menurut Horton dan Leslie dalam Suharto (2009: 152) mendefinisikan masalah sosial sebagai “suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”. Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang.

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut adalah masalah sosial.

1. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan.

Menurut paham hedonism, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainya. Ukuran “baik” atau “buruk” sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat.

1. Kondisi yang menuntut pemecahan.

Suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai di perbincangkan dan di seminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.

1. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif.

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksis sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

**E. Tinjauan tentang Jaringan Sosial**

**1. Pengertian Jaringan Sosial**

Individu sebagian besarorang mempunyai banyak hubungan sosial, seperti dari hubungan kenalan biasa sampai sahabat intim dan ikatan keluarga. Teman, sahabat dan anggota keluarga tersebut pada gilirannya berinteraksi dengan orang lain, dan mengembangkan sekumpulan ikatan-ikatan yang saling terkait bersama menjadi sejumlah besar orang-orang.

Menurut Lawang dalam Damsar (2015: 157) jaringan merupakan terjemahan dari *network*, yang berasal dari dua suku kata yaitu *net* dan *work*. *Net* di terjemahkan dalam bahasa sebagai jaring, yaitu tenunan seperti jala, terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung antara satu sama yang lain. Sedangkan kata *work* bermakna sebagai kerja. Gabungan kata *net* dan *work*, sehingga menjadi *network*, yang pemaknaanya terletak pada kata kerja bukan pada jaring , di mengerti sebagai kerja (bekerja) dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring (*net*). Berdasarkan cara berpikir seperti itu, maka jaringan (*network*) menurut Lawang dalam Damsar (2015: 157-158) adalah sebagai berikut:

1. Ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang di hubungan dengan media. Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu di pertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
2. Ada kerja antar simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama.
3. Seperti halnya sebuah jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar simpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak.
4. Dalam kerja jaring itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Malah kalau satu simpul saja putus, maka keseluruhan jaring itu tidak bisa berfungsi lagi, sampai simpul itu diperbaiki. Semua simpul itu menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini, analogi tidak seluruhnya tepat terutama kalau orang membentuk jaring itu hanya dua saja.
5. Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat di pisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan.
6. Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dan dipertahankan.

Sedangkan sosial menurut Damsar (2015: 58) dimengerti sebagai sesuatu yang dikaitkan atau dihubungkan dengan orang lain atau menunjuk pada makna subjektif yang mempertimbangkan perilaku atau tindakan orang lain yang berkaitan dengan pemaknaan tersebut. Jadi berdasarkan Damsar (2015: 58) jaringan sosial adalah “hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitan dengan sesuatu sebagai simpul atau ikatan”. Simpul di lihat melalui aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan merupakan hubungan antar para aktor tersebut”. Kemudian menurut Mitchell dalam Kunadi (2000: 13) jaringan sosial adalah:

Jaringan sosial seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara sekelompok orang yang karakteristik hubungan-hubungan tersebut berguna untuk menafsirkan motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan definisi menurut Damsar dan Mitchel di atas menunjukan bahwa:

1. Konsep jaringan sosial memliki makna hubungan subjektif (menurut pandangan (perasaan) sendiri) antara para aktor (individu atau kelompok).

2. Jaringan sosial hanya di lihat sebagai suatu sistem sosial.

3. Merupakan ikatan khusus antara individu atau kelompok yang mempunyai simpul atau karaketritik tersendiri.

4. Jaringan sosial tidak hanya di lihat sebagai jaringan yang khusus saja, tetapi juga bagaimana karakteristik dari hubungan-hubungan yang ada sehingga kemudian dapat di pergunakan untuk menginterpretasikan/menafsirkan tingkah laku sosial dari orang-orang terlibat di dalamnya.

5. Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi dari modal sosial selain kepercayaan dan norma-norma.

Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi modal sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Berdasarkan Nirfadilah (2016: 117) jaringan sosial adalah “adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan dari beberapa indvidu-individu di dalamnya yang saling mempunyai keterkaitan hubungan dalam perjalanan kehidupannya. Baik hubungan itu sifatnya kekeluargaan, teman, sahabat, kelembagaan (institusi), kelompok, ataupun kelompok yang mempunyai tujuan yang sama dan di ikat oleh norma serta nilai-nilai.

Keterikatan individu dalam hubungan sosial merupakan pencerminan diri sebagai mahluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat hubungan sosial yang dilakukan individu merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keberadaannya. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal kuantitas dan kualitas, juga intensitas hubungan sosial yang dilakukannya.

Menurut skala hubungan sosial yang dapat dimasuki oleh individu, Barnes dalam Retnowati (2013: 40) menyebutkan dua macam jaringan yaitu jaringan total dan jaringan bagian. Jaringan total adalah keseluruhan jaringan yang dipunyai seseorang dan meliputi bermacam kontras atau bidang kehidupan masyarakat. Jaringan bagian adalah jaringan yang di punyai seseorang terbatas pada bidang kehidupan tertentu seperti jaringan politik, jaringan kekerabatn, jaringan ketetanggan, jaringan pertemanan dan jaringan keagamaan.

Interaksi sosial merupakan basis untuk menciptakan hubungan sosial yang terpola yang disebut jaringan-jaringan hubungan sosial (*webs of social relationship*) atau pengeorganisasian sosial dan struktur sosial. Setiap interaksi sosial, formal ataupun informal memiliki pola tertentu. Berdasarkan Nasdian (2015: 63) mendefinisikan jaringan sosial yaitu:

Jaringan sosial adalah suatu pengelompokan yang terdiri atas tiga orang atau lebih, yang masing-masing orang tersebut mempunyai identitas tersendiri, dan yang masing-masing dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui hubungan-hubungan sosial yang ada, sehingga melalui hubungan-hubungan sosial tersebut mereka itu dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial atau kelompok sosial.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa jaringan sosial merupakan sekelompok individu yang terdiri dari individu minimal tiga individu dan setiap individu tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sebagai kesatuan sosial. Oleh karna itu, mereka yang berada di dalam jaringan sosial biasanya tidak sadar akan keanggotannya dalam jaringan sosial tersebut, karena jaringan sosial tersebut belum tentu terwujud dalam suatu organisasi dan perkumpulan resmi.

Bila seseorang memiliki mobilitas diri yang cukup baik untuk mengadakan hubungan-hubungan sosial yang luas, maka hal itu berarti ia mempunyai sejumlah jaringan. Hal ini juga mengandung arti bahwa seseorang tersebut akan memiliki sejumlah pengelompokan dan kestatusan sosial, sesuai dengan waktu, ruang, situasi dan kebutuhan atau tujuan yang akan di capainya. Dengan demikian, keanggotaan seseorang dalam suatu jaringan sosial bersifat fleksibel dan dinamis, serta selalu terkait dengan jaringan sosial yang kompleks.

**2. Bentuk jaringan sosial**

Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah memperlihatkan bahwa jaringan sosial beroperasi pada banyak tingkatan. Jaringan dapat di lihat dari 3 tingkatan yang ada, yaitu tingkatan mikro, meso, dan makro Damsar (2016: 160). Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaringan Mikro

Sebagai mahluk sosial, manusia tentu akan hidup bersama orang lain. Oleh sebab itu, manusia akan selalu melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi sosial yang terus-menerus antar individu akan mengkiristal dan menjadi hubungan sosial. Hubungan sosial yang terus berlanjut antar individu akan menghasilkan jaringan sosial di antara mereka.

1. Jaringan Meso

Dalam berinteraksi sosial dengan individu lain, pada umumnya individu melakukannya dalam konteks sosial, biasanya dalam suatu kelompok. Hubungan yang dibangun oleh para aktor (individu, kelompok dan masyarakat) dengan dan atau di dalam kelompok sehingga terbentuk suatu ikatan maka dapat disebut sebagai jaringan sosial di tingkat meso. Jaringan sosial pada tingkat ini bisa di temui dalam berbagai kelompok yang bisa di masuki atau di miliki seperti ikatan alumni mahasiswa kesejahteraan sosial, paguyuban pasundan, ikatan mahasiswa kuningan, ikatan profesi pekerja sosial, hobi dan lainnya.

1. Jaringan Makro

Jaringan makro merupakan ikatan yang terbentuk karena terjalinnya simpul-simpul dari beberapa kelompok. Dengan kata lain, jaringan makro terajut dari ikatan antara dua kelompok atau lebih. Kelompok dalam konteks ini bisa dalam bentuk organisasi, institusi, bahkan bisa pula Negara. Dengan demikian, jaringan makro dapat berupa ikatan antar organisasi, instansi atau Negara.

Sedangkan jaringan sosial yang dibahas dalam kapital sosial, menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan pengentasan masalah dapat berjalan secara efisin dan efektif. Berdasarkan Lawang (2005: 63) bentuk jaringan sosial yaitu:

1. Jaringan Antar Personal

Jaringan selalu terjadi antar personal. Anda mungkin membuka jaringan dengan suatu organisasi atau yayasan ternama, tetapi tetap orang yang mewakilinya. Mungkin anda setelah itu akan memperkenalkan diri dan memberikan kartu nama. Kalau setelah saling kenal tidak terjadi percakapan lebih lanjut, maka tidak terbentuk jaringan. Tetapi kalau kebetulan ada kepentingan yang di perkirakan dapat di penuhi lawan bicara itu, jaringan sudah mulai terbentuk. Apalagi kalau sesudah itu di ikuti dengan tindak lanjut dalam bentuk diskusi dalam pembicaraan serius, jaringan sudah terwujud. Di lihat dari jumlah orang yang terlibat, ada beberapa bentuk jaringan yang dapat di identifikasi:

1. Jaringan duaan tunggal (*dyadic*) menunjuk pada jaringan yang terbentuk antara dua orang saja, tanpa ada jaringan lainnya. Kalau dia mempunyai masalah cenderung bekerja sama dengan orang yang itu-itu saja.
2. Jaringan sosial duaan ganda menunjuk pada jaringan yang terbentuk antara A dan B, C, D, F tanpa ada saling hubungan sedikitpun antara B, C, D dan F.
3. Jaringan duaan ganda berlapis menunjuk pada hubungan antara A dengan beberapa satuan hubungan duaan ganda lainnya. Hubungan ini disebut berlapis karena B, C, dan D masing-masing mengembangan hubunganya sendiri.
4. Secara sistematis jaringan tigaan atau empatan atau limaan dapat saja terbentuk (Simmel 1950), strukturnya pasti lain. Makin banyak yang teribat maka makin rumit strukturnya. Lalu lintas hubungan antar individu semakin kompleks.
5. Jaringan Antar Individu dan Institusi

Walaupun sudah di kemukankan di atas bahwa institusi/lembaga sering di wakili oleh orang, namun institusi itu sendiri tetap penting. Putnam dalam Lawang (2005: 67) mengemukakan keanggotaan warga dalam beberapa institusi memungkinkannya mampu mengatasi berbagai masalah. Karena itu, jaringan yang terbentuk antara orang dan institusi dalam pengertian Putnam (1993) sekali pun praktis antar orang dan orang. Kalau ada orang yang seiman yang di bantu untuk memperoleh pekerjaan, terutama karena orangnya. Singkatnya, institusi itu, lebih banyak hadir dalam diri orang dari pada sebagai suatu kenyataan objektif. Karena orangnya yang menonjol lebih dari pada insitusinya.

1. Jaringan Antar Institusi

Di indonesia sudah terbentuk berbagai macam jaringan antar institusi. Yang perkembangan dan hasilnya perlu di kaji. Forum merupakan tempat dimana orang-orang ini berbicara atas nama institusi. Dengan kedudukan yang sama tinggi, mereka berdialog, berdiskusi, tukar pikiran, saling kenal dalam forum.

**3. Fungsi jaringan sosial**

Menurut Damsar (2016: 160) fungsi jaringan sosial dalam modal sosial yaitu fungsi memperlancar (pelumas), sebagai jembatan, dan sebagai perakat. Fungsi jaringan sosial memiliki kesamaan di tingkat mikro dan meso, sedangkan pada tingkat makro fungsi jaringan sosial lebih kepada sebagai jembatan. Dengan demikian, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai memperlancar (pelumas), sebagai pelumas jaringan sosial dapat di lihat dari berbagai kemudahan yang di peroleh untuk mengakses bermacam barang dan/atau sumber daya langka seperti informasi, jasa dan sebagainya.
2. Sebagai jembatan, jaringan sosial dapat memudahkan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya melalui daya hubung atau kekuatan relasi yang di miliki seseorang.
3. Sebagai perekat, memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial.

Sedangkan berdasarkan Lawang (2005: 69) fungsi jaringan sosial adalah sebagai berikut:

1. Fungsi informatif

Fungsi informatif disebut pula media informasi atau jaringan informasi yang memungkinkan setiap *stakeholders* dalam jaringan itu dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan masalah atau peluang atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

1. Fungsi akses/fungsi peluang

Menunjuk pada kesempatan yang dapat di berikan oleh adanya jaringan dengan orang lain dalam penyediyaan suatu barang atau jasa yang tidak dapat di penuhi secara internal dan organisasi.

1. Fungsi koordinasi

Fungsi ini merupakan suatu jaringan lebih banyak mendapat tempat dalam kegiatan-kegiatan informal yang justru membantu mengatasi masalah kebutuhan yang di sebabkan oleh keterbatasan birokrasi pemerintah.

**4. Nilai-nilai yang melekat pada Jaringan Sosial**

Menurut Hasbullah (2006: 14) nilai adalah “sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap banar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat”. Seorang filsuf Indonesia Notonagoro dalam Budiyono (2012: 142) membagi nilai dalam tiga macam pokok, yaitu:

1. Nilai material, apa bila sesuatu itu berguna bagi unsur jasmani manusia. Contohnya: sumber daya langka seperti modal, informasi, barang, jasa, kekuasaan dan sebagainya.
2. Nilai vital, jika ia berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan (beraktifitas). Contonya: gotong royong, kekeluargaan, kerukunan, solidaritas dan sebagainya.
3. Nilai kerohanian, apabila ia berguna bagi rohani manusia. Misalnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kerohanian ini dapat di bedakan lebih lanjut menjadi:
4. Nilai kebenaran atau kenyataan, yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia. Misalnya ide, gagasan, dan konsep.
5. Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa (estetis) manusia. Contohnya nilai harmonis yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pemicu keindahan dan kerukunan hubungan sosial yang tercipta.
6. Nilai religius, yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghanyatan melalui akal dan budi nuraninya. Misalnya toleransi dan membina kerukunan hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat oleh nilai-nilai, dan norma-norma yang di pedomi sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan baik dengan yang lain. Beberapa acuan nilai dan unsur merupakan ruh modal sosial anatara lain sikap partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling mempercayai dan di perkuat oleh nilai- nilai dan norma-norma yang mendukungnnya.

**5. Sifat Jaringan Sosial**

Diskusi tentang sifat jaringan yang positif dan negatif, atau yang tertutup dan terbuka mungkin perlu di batasi untuk masuk ke debat yang tidak berkesudahan. Ada beberapa prinsip yang akan di gunakan sebagai tolak ukur untuk melihat masalah ini Lawang (2005: 68) yaitu sebagai berikut:

1. Jaringan sosial apapun harus diukur dengan fungsi ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi ekonomi menunjuk pada produktivitas, efisiensi dan efektifitas yang tinggi, sedangkan fungsi sosial menunjuk pada partisipatif, kebersamaan yang di peroleh dari kegiatan ekonomi.
2. Masih dalam fungsinya untuk memperlancar (pelumas) kegiatan ekonomi jaringan sosial harus memiliki sifat keterbukaan pada semua orang untuk memberikan kesempatan kepada publik menilai fungsinya mendukung kepentingan umum.
3. Kombinasi dari fungsi ekonomi dan sosial sekaligus yang terdapat dalam kapital sosial, jaringan sosial harus bersifat emansipatoris dan integratif.

**F. Tinjauan tentang Kemiskinan**

**1. Pengertian Kemiskianan**

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahteran. Dengan demikian, kondisi yang menunjukan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan impilikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Menurut Nurhadi (2007: 13) secara etimimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskianan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang setiap hari dan kebutuhan non-makanan yang tediri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, serta aneka barang dan jasa lainnya (Nurhadi, 2007: 13).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung yang disebabkan oleh berbagai hal baik dari diri pribadi individu maupun dari faktor luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengakses sistem sumber yang ada disekitarnya.

Berdasarkan Hamudy dalam Khomsan, dkk (2015: 1-2) Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional. Sedangkan menurut Kartasasmita dalam Rustanto (2014: 1) menyatakan bahwa kemiskinan “merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan”.

Berdasarkan definisi dari Hamudy dan Kartasasmita di atas maka kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi yang serba kekurangan (sandang, pangan dan papan) ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang dipengarui oleh aspek-aspek seperti kurangnya sumber daya alam/sumberdaya manusia, kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang kurang mendukung serta tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*) sangat minim.

Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepatnya jika digunakan sebagai pisau analisis, konsepsi kemiskinan ini juga sangat dekat dengan perspektif pekerjaan sosial yang memfokuskan pada konsep keberfungsian sosial dan senantiasa melihat manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosialnya.

Kemiskinan menurut Ellis dalam Suharto (2014: 133) menyatakan bahwa dimensi kemiskinanan menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat di definiskian sabagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik kemiskianan dapat di lihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Dan kemiskian secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Berbagai definisi yang telah disebutkan diatas, dapat menjelaskan masalah kemisikinan yang terjadi sebagai suatu kondisi ketikadmampuan yang dialami individu, dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Selain itu di desa Bugis masih banyak warga yang belum dapat mengakses program-program pemerintah karena ketidaktahuan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

**2. Bentuk Kemiskinan**

Menurut Chamber dalam Khomsan, dkk (2015: 3) kemiskinan dibagi menjadi dalam empat bentuk yaitu:

1. Kemiskinan absolut: bila pendapatan berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, dan papan kesehatan dan pendidikan yang di perlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakyat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyrakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas pemboros, tidak kreatif meski ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural: situasi kemiskinan di sebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial dan budaya sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan

Berbagai cara untuk mengatasi kemiskinan seringkali terbentur oleh perilaku kemiskinan kultural. Mereka yang mengalami kemiskinan kultural mungkin sudah pasrah dan menerima keadaan apa adanya karena keenganan mereka untuk mengentaskan diri dari kemiskian.

**3. Penyebab kemiskinan**

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan disebakan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskianan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Secara konseptual, kemiskianan bisa di akibatkan oleh empat faktor Suharto (2013: 17-18), yaitu:

1. Faktor individual

Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin di sebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

1. Faktor sosial

Kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

1. Faktor kultural

Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemisikinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap-sikap “negatif” seperti malas, fatalism, atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha dan kurang menghormati etos kerja.

1. Faktor struktural

Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

**4. Indikator Kemiskinan**

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Rustanto (2013: 5) yaitu keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1. Disebut pra sejahtera apabila tidak bisa memenuhi satu syarat indikator. Sementara yang disebut keluarga sejahtetra 1 yang memenuhi indikator tersebut. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di pakai dirumah, bekerja, sekolah dan berpergian.
3. Rumah yang di tempati keluarga memiliki atap, lantai dan dingding yang baik.
4. Bila ada anggota keluaraga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana (KB) pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Sedangkan berdasarkan SMERU dalam Suharto (2013: 16) menunjukan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber daya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan fasiltas umum).
5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum).
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan trasportasi).
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari Negara dan masyarakat).
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.